

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Keistimewaan (Danais) pada tingkat kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun anggaran 2021 hingga 2023. Informan utama dalam penelitian ini adalah Paniradya Kaistimewaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, serta Inspektorat DIY. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Efektivitas dianalisis melalui ketercapaian tujuan dan kesesuaian perencanaan. Rasio efektivitas menunjukkan hasil cukup efektif pada 2021 (99,84%) dan 2023 (98,23%), serta efektif pada 2022 (100%). Penyelenggaraan BKK Danais juga telah sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPD, dan Renja OPD terkait. Dari sisi akuntabilitas, pelaksanaan telah memenuhi akuntabilitas keuangan, prosedural, dan kinerja.

Faktor pendukung meliputi regulasi yang lengkap, pemantauan kelembagaan tahunan, keterlibatan aktif OPD melalui juknis, dan terbentuknya OPD baru yang menangani reformasi kalurahan. Sementara itu, hambatan utama adalah terbatasnya SDM di kalurahan, baik secara kualitas maupun kuantitas, yang berdampak pada lambatnya respons terhadap percepatan pelaksanaan program, khususnya dalam aspek administrasi dan digitalisasi.

Kata kunci: Bantuan Keuangan Khusus, Dana Keistimewaan, efektivitas, akuntabilitas, kalurahan, DIY.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and accountability of the implementation of Special Financial Assistance (BKK) sourced from the Yogyakarta Special Autonomy Fund (Danais) at the village (kalurahan) level in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the 2021–2023 fiscal years. The main informants in this study include the Paniradya Kaistimewaan, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKA DIY), and the DIY Inspectorate. The research adopts a qualitative descriptive approach using interviews, document analysis, and field observations.

Effectiveness is evaluated based on goal achievement and alignment with planning documents. The effectiveness ratio shows "fairly effective" results in 2021 (99.84%) and 2023 (98.23%), and "effective" in 2022 (100%). The implementation has also aligned with regional planning documents such as the RPJMD, RKPD, and the work plans (Renja) of the relevant OPDs. In terms of accountability, the program has met financial, procedural, and performance accountability standards.

Supporting factors include comprehensive regulations, annual institutional monitoring, active involvement of implementing agencies through technical guidelines, and the establishment of a new agency responsible for village reform. Conversely, the main inhibiting factor is the limited human resources at the village level—both in quality and quantity—which hinders timely responses to program acceleration, especially in administrative and digital aspects due to the burden of managing multiple applications.

Keywords: Special Financial Assistance, Danais, effectiveness, accountability, village governance, Yogyakarta.